

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sistem Jaminan Sosial Nasional seperti yang tertuang dalam UU No 40 tahun 2004 ditetapkan untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh dan memastikan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial diantaranya yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk mewujudkan hal ini dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang tertuang pada UU nomor 24 tahun 2011. Upaya untuk mempercepat terselenggaranya program JKN ini dilakukan dengan pencaanangan Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional di Tahun 2019 yang kemudian ditetapkan 8 (delapan) sasaran dimana salah satu sarasannya adalah seluruh penduduk, diperkirakan 257,5 juta jiwa telah terjamin (Kemenkes 2012)

Perluasan kepesertaan dilakukan dimulai dengan menyatukan pengelolaan peserta Askes Sosial/PNS, pengalihan pengelolaan Jamkesmas dari Kemenkes sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), pengalihan jaminan kesehatan dari TNI/POLRI, sebagian peserta Jamkesda, serta pengalihan peserta JPK Jamsostek,. Pada prinsipnya seluruh pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Kesehatan. Namun pemberi kerja yang kini telah menyediakan jaminan kesehatan bagi pekerjanya secara mandiri diberikan kelonggaran untuk bergabung paling lambat hingga awal tahun 2019 (*wait and see first*) agar seluruh pekerja terlindungi seluruhnya melalui BPJS Kesehatan. Jumlah pekerja swasta yang tercakup dalam kepesertaan JPK Jamsostek hanya sekitar 2 juta pekerja dengan jumlah bertanggung sekitar 4,9 juta jiwa (Kemenkes 2012).

Target kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagai bagian dari program jaminan sosial SJSN adalah seluruh penduduk yang tinggal di Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya mencapai kepesertaan menyeluruh (*universal health coverage*) Jaminan Kesehatan maka perlu dikenali jumlah, perkembangan, distribusi dan karakteristik penduduk Indonesia secara keseluruhan khususnya (Kemenkes 2012)

*Universal Health Coverage* yang ditargetkan pada 1 Januari 2019 belum tercapai. Data nasional yang diambil dari situs resmi BPJS Kesehatan terhitung per 1 Juli 2019 jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan masih mencapai 222.463.022 atau sekitar 82% orang dari berbagai jenis peserta (BPJS Kesehatan), dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 267 Juta Jiwa.

Di Jawa Timur sendiri, terhitung per 26 Juni 2019 jumlah peserta sebanyak 29,4 juta jiwa dari total 40,9 juta jiwa penduduk Jawa Timur, artinya baru 72% penduduk di Jawa Timur yang menjadi peserta JKN-KIS dan ditargetkan hingga akhir 2019 kepesertaan di Jawa Timur mencapai 95%. Sedangkan di salah satu daerah di Jawa Timur yaitu Kabupaten Tulungagung tingkat kepesertaannya masih 59%, yang artinya kepesertaannya masih tergolong rendah. (<https://jatim.antaranews.com/berita/265194/peserta-bpjs-kesehatan-di-jatim-masih-64-persen>)

Padahal berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, di tempat atau wilayah tersebut sosialisasi maupun pengarahannya juga telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada masyarakat, baik langsung datang ke pemukiman, maupun sosialisasi di tempat yang ramai. Berdasarkan gambaran mengenai kondisi kepesertaan yang telah dikemukakan sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kemauan masyarakat Kabupaten Tulungagung dalam mengikuti program JKN tahun 2019

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sharon Angelica, 2017 ada 5 tahapan dalam proses sosialisasi BPJS Kesehatan yaitu:

1. Pada tahapan yang pertama, keenam informan yang diwawancarai peneliti merasa sadar akan pentingnya menjadi peserta BPJS Kesehatan setelah mereka mendapat terpaan informasi dari media massa. Ajakan dari pemerintah untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan dan menyatakan bahwa BPJS Kesehatan itu ada dan hadir lewat program-programnya bagi masyarakat serta betapa pentingnya untuk mempunyai BPJS Kesehatan, menjadi alasan yang mendorong pemikiran sadar masyarakat betapa pentingnya penggunaan BPJS Kesehatan.
2. Pada tahapan yang kedua, setelah mereka menyaksikan informasi lewat media massa yang ada mengenai BPJS Kesehatan ada ketertarikan dari mereka untuk mengetahui informasi lebih lagi. Sehingga beberapa dari mereka ada yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja mencari tahu informasi mengenai BPJS Kesehatan lebih jelas lagi, seperti membuka *website* BPJS Kesehatan yang asli, membaca brosur ataupun menyaksikan acara *talk show* di televisi. Hal ini mereka lakukan secara sadar bahwa mereka tertarik dengan informasi mengenai BPJS Kesehatan.
3. Tahapan ketiga, pada tahapan ini yang informan rasakan setelah ketertarikan yaitu menilai secara pribadi keuntungan dan kerugian menjadi peserta dan menggunakan BPJS Kesehatan. Dari masing-masing informan menilai apakah manfaat yang ditimbulkan dari BPJS Kesehatan bagi hidup mereka. Disini keenam informan merasakan manfaat yang lebih dari penggunaan BPJS Kesehatan lebih banyak daripada

kekurangannya, seperti dengan menggunakan BPJS Kesehatan merupakan faktor preventif mereka untuk kesehatan. Ada perasaan aman karena sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan karena tidak perlu memusingkan biaya ketika tiba-tiba sakit. Faktor ekonomi, yaitu biaya iuran itu murah.

4. Tahapan keempat, setelah segala perhitungan dan evaluasi akan betapa program yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan sangat diperlukan di dalam tahapan ini informan sudah mulai melakukan tindakan yaitu dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Hal ini hanyalah langkah kecil untuk mengetahui memadai atau tidak.

5. Tahapan yang kelima, disini informan mulai menggunakan manfaat pelayanan yang telah disediakan oleh BPJS Kesehatan. Ketika masing-masing dari informan yang ada sakit maka mereka juga langsung menyertakan kartu BPJS Kesehatan supaya dapat merasakan manfaat pelayanan yang dijanjikan. Disini dari enam informan yang ada, tiga informan sudah merasakan manfaat pelayanan BPJS Kesehatan dan merasa dibantu serta diuntungkan. Oleh sebab itu mereka secara berkala membayarkan iurannya tiap bulan, dan dua informan walaupun mereka belum pernah merasakan manfaat layanannya namun tetap membayar dengan alasan faktor “menjaga-jaga”. Sedangkan informan yang satu, sudah berhenti membayar iuran dengan alasan lupa.

Berdasarkan studi pendahuluan, di daerah tersebut telah dilakukan sosialisasi oleh petugas BPJS Kesehatan mengenai program JKN, namun hingga saat ini tingkat kepesertaannya masih saja rendah, hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “gambaran kemauan masyarakat di Kabupaten Tulungagung dalam mengikuti program JKN tahun 2019”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan oleh peneliti di latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana gambaran kemauan masyarakat di Kabupaten Tulungagung dalam mengikuti program JKN tahun 2019?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran kemauan masyarakat di Kabupaten Tulungagung dalam mengikuti program JKN di tahun 2019

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi:

1. BPJS Kesehatan:

Sebagai masukan bagi BPJS Kesehatan KC Tulungagung khususnya di Kabupaten Tulungagung untuk pengembangan kebijakan terkait peningkatan kepesertaan JKN.

2. Penulis:

Mengetahui faktor-faktor yang mendukung kemauan masyarakat di Kabupaten Tulungagung untuk mengikuti program JKN.